

**IMPLEMENTASI YURIDIS PERJANJIAN PINJAM KOPERASI  
SERBA USAHA (KSU) SURYA SEKAWAN  
MARTAPURA KABUPATEN BANJAR**

**Zidan Audah<sup>1</sup>, Afif Khalid<sup>2</sup>, Fathan Ansori<sup>3</sup>**

Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari  
Banjarmasin, 19810145

Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari  
Banjarmasin, 1117048501

Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari  
Banjarmasin, 1123069301

Email : zidanaudah619@gmail.com

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi perjanjian pinjaman pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Surya Sekawan Martapura Kabupaten banjar. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris, yang mana penelitian ini membahas mengenai pemberlakuan atau implementasi. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi kepustakaan serta wawancara. Adapun data yang diperoleh pada penelitian ini dianalisis dengan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian skripsi ini dapat di simpulkan bahwa: Pertama, Implementasi perjanjian pinjaman pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Surya Sekawan Martapura Kabupaten Banjar. Dalam pengimplementasian perjanjian yang dilakukan antar pihak sangat mudah. Kedua, Penerapan perlindungan terhadap pihak apakah salah satu melakukan *wanprestasi* pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Surya Sekawan Martapura Kabupaten Banjar diatur dalam KUHPerduta Pasal 1754, Pasal 1313, Pasal 1320 KUHPerduta dan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 14/Per/M.KUKM/XII/2009.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 1997, Hukum Koperasi, Alumni, Bandung.
- Arifin Sitio, Halomoan Tanba, 2001, Koperasi Teori dan Praktik, Jakarta, Erlangga.
- Chaniago, 1998, Ekonomi dan Koperasi, Rosda Karya, Bandung.
- Dermawan Wibison. Riset Bisnis Panduan Bagi Praktisi Dan Akademisi, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Dr. H. Abdul Kadir Audah, SE., MM., 2023, Ekonomi Koperasi dan UMKM, Banjarbaru.
- Edy Putra, 1989, Kredit Perbankan Sebagai Tinjauan Yuridis, Yogyakarta, Liberty.
- Hamzah, Andi. 1991. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta :Rineka Cipta.
- JB. Djarot Siwijatmo, 1992, Manajemen Koperasi, Yogyakarta : BPFE.
- Kartasapoetra dan A. G Kartasanoetra dan kawan, 2001, Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Mariam Darus Badruzaman, 2001, Kompilasi Huku Perikatan. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Muchdarsyah Sinungan, 1990, Kredit Seluk Beluk dan Pengelolaannya, Jakarta: Yagrat.
- Muhammad Djumliana, 2000, Hukum Perbankan di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka Pelajar.
- Partadiredja Atje, 2000, Manajemen Koperasi, Jakarta, Penerbit Bharata, Siwijatmo, JB. Djarot, 1992, Manajemen Koperasi, Edisi 5, BPFE, Yogyakarta.
- Pamji Anoraga dan Ninik Widiyanti, 1993, Dinamika Koperasi, Rineka Cipta, Jakarta.
- Revrison Baswir, 2000, Koperasi Indonesia, Yogyakarta, BPFE –Yogyakarta. Ronny Hanitijo Soemitro, 1994 Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soetrisno, 2010, Penyelesaian Sengketa Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Dalam Pengambilan Kredit di Lembaga Perbankan, (Fakultas Hukum UPM "Veteran" Jati,.)

Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux, Semarang, Widya Karya.

Sutantya Raharja Hadhikusuma, 2000, Hukum Koperasi Indonesia, Jakarta PT Raja Grafindo Persada.

Wirjono Prodjodikoro, 1993, Asas-asas Hukum Perjanjian, Sumur Bandung, Bandung.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Penjelasan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 KUH Perdata. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusi. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang ( UU SRG)

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Penetapan Batas Waktu penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Untuk Menjamin Pelunasan Kredit-Kredit Tertentu.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1996 Tentang Bentuk Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, Akta Pemberian Hak Tanggungan, Buku Tanah Hak Tanggungan, Dan Sertipikat Hak Tanggungan.

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Nomor 21/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.

## **WEBSITE**

Detik.com "Apa Itu Implementasi Pengertian, Tujuan, dan Contoh Penerapannya" dapat diakses jam 23:12 pada [https://www.detik.com/jabar/berita/d-6185222/apa-itu-  
implementasi-pengertian-tujuan-dan-contoh-penerapannya](https://www.detik.com/jabar/berita/d-6185222/apa-itu-implementasi-pengertian-tujuan-dan-contoh-penerapannya), pada tanggal 28 Desember 2022.

## **WAWANCARA**

Wawancara dengan Ibu Padiyah,S.Sos selaku Seketaris Koperasi Serba Usaha (KSU) Surya Sekawan Martapura Kabupaten Banjar, tanggal 5 Juni 2023.

Wawancara dengan Bapak Hasbi Rifani,SKM selaku Wakil Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Surya Sekawan Martapura Kabupaten Banjar, tanggal 5 Juni 2023.

Wawancara dengan Bapak Indra Setiawan selaku Teller Koperasi Serba Usaha (KSU) Surya Sekawan Martapura Kabupaten Banjar, tanggal 5 Juni 2023.